

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan dalam ranah publik merupakan aspek penting yang wajib harus disediakan oleh organisasi publik termasuk dalam tingkat desa. Adanya kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel dan transparan bisa dilihat dari sisi kualitas laporan keuangan yang dibuat. Pengelolaan keuangan desa memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan pelayanan dasar dan memfasilitasi pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa menjadi kunci dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya keuangan publik. Urgensi tentang pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa harus menuangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang akuntabel dan bertanggung jawab di dalam APB Desa (APBDes).

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk APBDes, maka dibuatlah sebuah aplikasi yang dikenal dengan istilah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang merujuk pada beberapa regulasi berupa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PMK 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Selanjutnya upaya pengembangan aplikasi Siskeudes versi 2.0 sesuai dengan peraturan terkait

pengelolaan keuangan desa yaitu diantaranya PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Output aplikasi Siskeudes versi 2.0 lebih lengkap dan lebih rinci dari versi sebelumnya. Versi terbaru ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan desa, meminimalisir penyimpangan, sekaligus mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Pratiwi dan Pravasanti (2020) juga menyampaikan bahwa kelebihan aplikasi Siskeudes yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya.

Aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut memiliki kelebihan dibandingkan Siskeudes versi 1.0 sebelumnya, hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Desa bahwa pada Siskeudes terbaru versi 2.0 memiliki kelebihan berupa penambahan fitur interkoneksi dengan aplikasi OM-SPAN (*Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) sehingga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dari tingkat daerah hingga tingkat pusat atau kementerian tertentu (Binapemdes, 2019).

Aplikasi sistem keuangan desa yang diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, ternyata belum bisa diimplementasikan secara optimal. Hal ini terjadi di desa kepulauan Kabupaten Sumenep. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, H.

Achmad Masuni, SE, MM bahwa hanya 10% desa yang melakukan aplikasi siskeudes. Merujuk dari fenomena tersebut, maka diketahui bahwa salah satu faktor terhambatnya implementasi penggunaan SISKEUDES di Kabupaten Sumenep adalah karena faktor kompetensi SDM di tingkat aparaturnya desa, hal ini disampaikan pula oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, H. Achmad Masuni, SE, MM bahwa kendala dalam operasionalisasi siskeudes tersebut adalah permasalahan dari perangkat desa dan operator desa dalam menggunakan aplikasi tersebut (Sumenepkab.go.id, 2018).

Merujuk pada fenomena tersebut diketahui bahwa terdapat 90% desa yang belum melakukan input data yang secara umum desa tersebut merupakan desa kepulauan. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Sumenep memiliki pola geografis kepulauan yang dipisahkan oleh lautan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Salah satu kendala yang menyebabkan lambannya pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM pada aparaturnya desa di Kabupaten Sumenep adalah jauhnya jarak tempuh dari desa kepulauan tersebut dengan Kabupaten Sumenep. Terdapat dua wilayah di Kabupaten Sumenep yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dan akses komunikasi yang terbatas, dua wilayah tersebut adalah Kepulauan Masalembu dan Kepulauan Sapeken. Hal ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumenep (2022) bahwa Kepulauan Masalembu merupakan pulau yang terjauh dan lebih dekat ke daerah Kalimantan Selatan dengan jarak 151 mil laut dan jarak tempuh sekitar 20 jam perjalanan laut dari Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Kepulauan Sakala yang termasuk dalam Kecamatan Sapeken merupakan wilayah sebelah timur Kabupaten Sumenep dengan jarak 165 mil laut yang justru lebih dekat dengan daerah Sulawesi dengan karakteristik yang

sama dengan kepulauan Masalembu yaitu jarak tempuh yang cukup lama yaitu antara 20 jam hingga 24 jam perjalanan laut dari Kabupaten Sumenep.

Karakteristik Pulau Masalembu dan Pulau Sapeken yang jauh dari Kabupaten Sumenep berdampak pada tidak optimalnya pengembangan kompetensi SDM, fenomena ini diperkuat oleh penyampaian Hanafie et al. (2019) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa di Pulau Masalembu adalah karena belum maksimalnya peran pendampingan yang dilakukan pendamping desa, hal tersebut karena adanya kendala dalam aspek geografis yakni jarak yang jauh dan sulit dijangkau. Sehingga merujuk pada kajian empiris tersebut bisa dibuktikan bahwa memang benar adanya fenomena berupa rendahnya kompetensi SDM di Pulau Masalembu.

Selain berkaitan dengan permasalahan rendahnya kompetensi SDM di desa kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep, permasalahan lainnya adalah kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep, hal ini disampaikan oleh Faisol dan Rofik (2019) yang menyatakan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki laporan keuangan dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Meskipun masuk dalam kategori wajar, namun kriteria WDP tersebut memiliki celah berupa beberapa salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan di Kabupaten Sumenep. Meskipun opini WDP yang diperoleh Kabupaten Sumenep tersebut dapat diandalkan, namun *stakeholder* atau pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkap auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak salah dalam pengambilan keputusan.

Selain temuan berupa perolehan WDP pada pemerintah daerah Kabupaten

Sumenep tersebut, indikasi buruknya sistem dan kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Sumenep juga disampaikan oleh Hanafie et al. (2019) bahwa dalam kajian empirisnya ditemukan laporan keuangan Dana Desa tidak dibuat sendiri oleh kepala desa, tetapi dibuat oleh konsultan atau diistilahkan dengan “tukang jahit” yang merupakan pihak di luar desa dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat laporan keuangan desa, adanya fenomena ini diketahui di Desa Masalima dan Desa Karamian Kecamatan Masalembu. Merujuk pada beberapa kenyataan tersebut maka dapat mengindikasikan bahwa laporan keuangan desa di Kecamatan Masalembu tersebut memiliki kualitas jauh dari harapan karena sudah cacat dari sistem pembuatannya.

Guna mengatasi lambannya desa kepulauan dalam mengaplikasikan siskeudes, maka pihak DPMD Kabupaten Sumenep menggelar bimbingan teknologi (bimtek) pada perangkat serta operator desa beserta pihak pendamping desa guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran, hal ini disampaikan dalam harian Bongkar 86 (2019) yang menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 berikan pelatihan tentang aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang berlangsung selama tiga hari. Beberapa materi aspek yang dipelajari dalam bimtek tersebut yaitu terkait dengan teknis pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi dalam bentuk aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan dari setiap desa di Kabupaten Sumenep.

Kualitas laporan keuangan merupakan aspek penting khususnya dalam

bidang akuntansi sektor publik, hal ini karena dengan kualitas laporan yang baik menjadi faktor penentu dalam realisasi penggunaan dana desa serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu, pentingnya kualitas laporan keuangan desa yang baik juga disampaikan oleh Hasliani dan Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*) dan dapat dipahami (*understandability*).

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka urgensi penelitian ini yaitu adanya temuan bahwa di desa kepulauan di Kabupaten Sumenep masih banyak yang belum memahami tentang penerapan aplikasi Siskeudes Versi 2.0, hal ini juga di alami oleh Desa Masakambing yang merupakan desa kepulauan di Kabupaten Sumenep. Upaya untuk pendampingan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur desa juga telah dilakukan. Namun permasalahan lainnya yaitu karena karakteristik geografis Desa Masakambing yang sangat jauh dari Kabupaten Sumenep dan hanya dihubungkan melalui transportasi kapal laut dengan jarak tempuh antara 18 jam hingga 20 jam (Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumenep, 2022).

Upaya pembelajaran dan peningkatan kompetensi SDM juga pernah dilakukan melalui *online*, namun menurut penyampaian aparatur Desa Masakambing dari hasil wawancara awal dinyatakan bahwa hal ini kurang efektif

karena layanan komunikasi yang tidak memadai di Desa Masakambing dan hanya memiliki kecepatan internet antara 0,7 mbps hingga 1,2 mbps, sehingga penyampaian materi dalam zoom sering terjadi atau bahkan terputus dari sambungan zoom tersebut. Merujuk dari beberapa permasalahan dan fenomena yang terjadi tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian tentang implementasi Siskeudes Versi 2.0 tersebut serta kompetensi aparatur desa kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Merujuk dari beberapa poin yang telah disampaikan, maka diketahui bahwa terdapat tiga fenomena utama yang menjadi urgensi penelitian ini. *Pertama* yaitu rendahnya implementasi siskeudes di desa kepulauan Kabupaten Sumenep sebagaimana disampaikan dalam harian Sumenepkab (2018) bahwa sekitar 90% desa kepulauan yang belum menginput data dalam siskeudes. *Kedua* yaitu rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa sebagaimana disampaikan Hanafie et al. (2019) bahwa aparatur desa di Pulau Masalembu belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan membutuhkan pendampingan yang intensif. *Ketiga* yaitu berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam sektor publik baik kualitas laporan keuangan di tingkat Kabupaten Sumenep dan tingkat desa di Kabupaten Sumenep, hal ini disampaikan oleh Faisol dan Rofik (2019) serta kajian empiris dari Hanafie et al. (2019) bahwa laporan keuangan desa di Kecamatan Masalembu seringkali dibuat oleh pihak lain dengan istilah “*tukang jahit*” sehingga tindakan yang demikian menyalahi prosedur dan bisa berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan desa.

Meskipun banyak terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Sumenep sebagaimana disampaikan pada rujukan

sebelumnya, namun pemerintah Kabupaten Sumenep melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sumenep terus berusaha meningkatkan kualitas laporan pemerintah desa dengan melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes tersebut secara bertahap selama dua kali dalam satu tahun, sebagaimana disampaikan dalam harian Seputar Madura (2017) bahwa sejak tahun 2017 sudah dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes secara bertahap kepada aparatur pemerintah desa. Pelaksanaan pelatihan Siskeudes oleh DPMD Kabupaten Sumenep tersebut merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa sebagai faktor sumber daya manusia (SDM), karena meskipun aplikasi Siskeudes dirancang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan fitur-fitur yang canggih dan *user-friendly*, hasil yang optimal hanya dapat dicapai jika pengguna yaitu SDM desa memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Merujuk pada beberapa masalah tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada judul berupa “Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Melalui Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Masalembu dan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

2. Apakah Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) berpengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat memediasi Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
2. Untuk menganalisis pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) terhadap kompetensi sumber daya manusia
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
4. Untuk menganalisis kemampuan variabel kompetensi sumber daya manusia dalam memediasi pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penjelasan mengenai kedua manfaat tersebut dijabarkan pada poin berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumber informasi oleh masyarakat luas dan aparaturn pemerintah khususnya aparaturn pemerintah desa dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan desa melalui peningkatan kompetensi aparaturn pemerintah desa dan implementasi sistem keuangan desa yang optimal.

2. Manfaat praktis

Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi publik mengenai implementasi siskeudes dan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk kajian penelitian selanjutnya.

